

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan peradaban dunia semakin hari semakin melesat, begitu pula dengan pembangunan dalam sebuah negara. Pembangunan merupakan suatu proses yang menyangkut perubahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam struktur sosial, ekonomi, kelembagaan, dan sikap dari masyarakat itu sendiri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (Smith & Todaro, 2012). Menurut Sumitro (1994) pembangunan didefinisikan sebagai transformasi yang terjadi pada struktur ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada keadaan yang ada di dalam sebuah landasan kegiatan ekonomi.

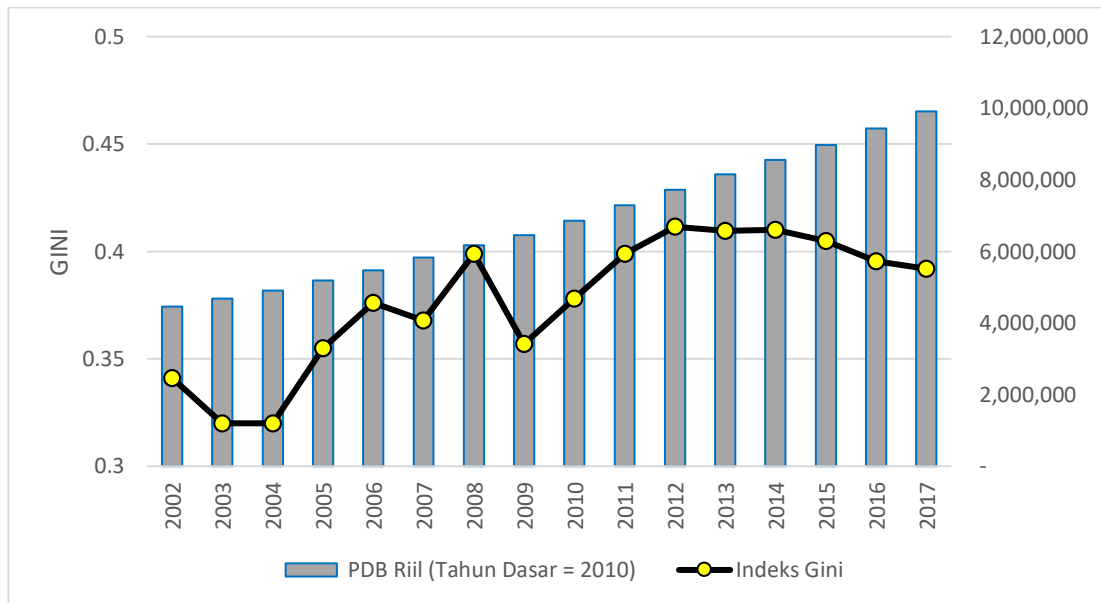
Pembangunan merupakan suatu proses untuk mencapai kemajuan, pembangunan juga merupakan pencerminan dari partisipasi masyarakat dalam melakukan peningkatan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran secara terus-menerus, adil dan merata, serta pengembangan penyelenggaraan negara yang lebih maju, demokratis dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Istilah pembangunan sudah menjadi terminologi sejak lama di Indonesia. Terminologi yang erat kaitannya dengan pembangunan dikenal dengan sebutan Trilogi

Pembangunan. Trilogi Pembangunan merupakan tumpuan untuk pelaksanaan pembangunan di Indonesia sejak Pelita III yang dibuat pada zaman orde baru, seperti tercantum dalam GBHN pada masa tersebut, yang terdiri dari tiga unsur (Hadiwijoyo, 2013), yaitu :

- Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Seperti dinyatakan oleh *World Economic Forum* (2017), di Indonesia, walaupun pembangunan yang dilaksanakan tergolong lambat, tetapi pembangunan yang terjadi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pembangunan yang terjadi, tentunya tidak akan luput dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diukur melalui Produk Domestik Bruto dari tahun ke tahun semakin meningkat dan menjadikan Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di dunia.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Grafik 1.1 Perbandingan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan

Pendapatan di Indonesia tahun 2002-2017

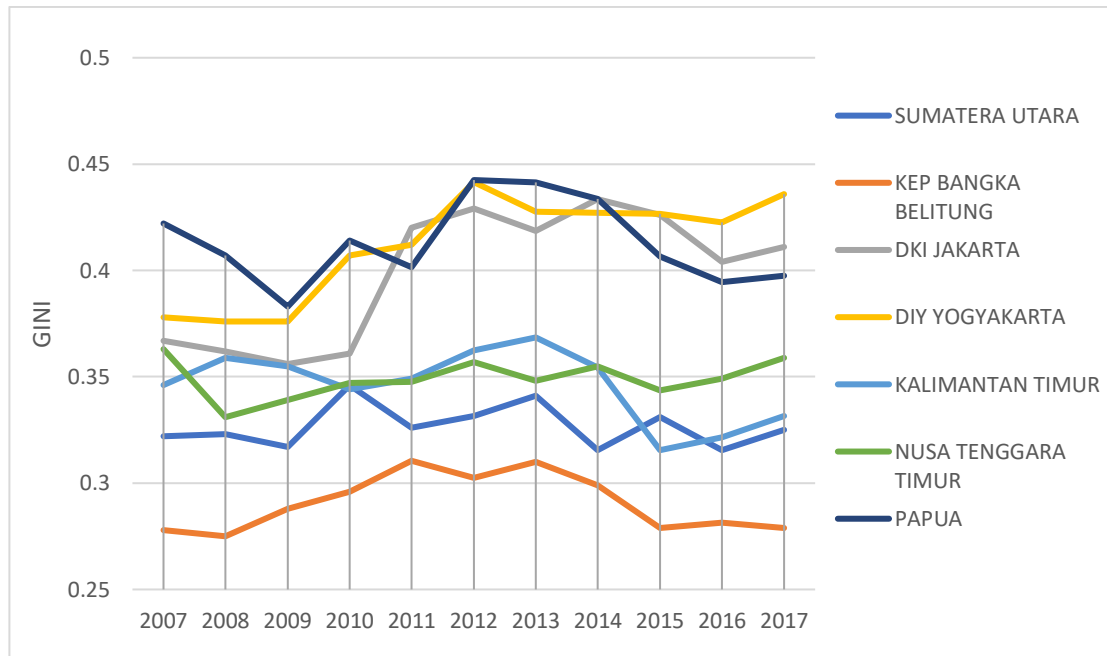
Namun, Sen (2001) menyatakan walaupun sebagian orang berhasil menikmati kemakmuran, tetapi kualitas hidup masih tetap jauh dari jangkauan banyak orang. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan keuntungan dari kemajuan tersebut. Banyak situasi dimana kebijakan pembangunan ternyata lebih menguntungkan kaum golongan atas. Hal ini dapat dilihat dari ketimpangan sosial atau ketimpangan pendapatan di Indonesia yang masih cukup tinggi. Dapat dilihat dari grafik 1.1 bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, namun diikuti oleh ketimpangan pendapatan di Indonesia. Meskipun ketimpangan pendapatan Indonesia

mengalami penurunan selama lima tahun terakhir ini, seperti yang dapat kita lihat juga pada grafik 1.1 bahwa angka ketimpangan pendapatan di Indonesia masih dinyatakan cukup tinggi dan bahkan sempat naik secara tajam pada tahun 2012 dengan nilai Indeks Gini tertinggi sejak tahun 2002, yaitu sebesar 0.4115.

Smith & Todaro (2012) menyatakan dalam bukunya bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak secara langsung dapat memperbaiki distribusi keuntungan bagi penduduk. Bahkan pertumbuhan yang terlalu cepat dapat berdampak buruk khususnya terhadap golongan miskin, hal ini dikarenakan golongan miskin dapat terpinggirkan oleh perubahan struktural dalam pertumbuhan modern. Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Baudrillard (2011) bahwa ideologi pertumbuhan ekonomi, menghasilkan dua hal, yaitu kemakmuran bagi yang diuntungkan dan kemiskinan bagi yang terpinggirkan.

Seperti yang disebutkan dalam kedua ideologi diatas, ketimpangan pendapatan terjadi karena pertumbuhan ekonomi tidak dapat secara merata dinikmati oleh seluruh rakyat di suatu negara. Kebanyakan rakyat golongan dengan pendapatan rendah tidak dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi. Permasalahan ini sangat mudah muncul di negara berkembang seperti Indonesia. Maka dari itu, meskipun Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dan terus meningkat, namun Indonesia juga memiliki ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi. Bahkan *World Bank* (2015) mencatat bahwa Indonesia memiliki laju peningkatan ketimpangan pendapatan

tertinggi di Asia Timur. Tak hanya itu, Indeks Gini di provinsi di Indonesia juga cukup tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Grafik 1.2 Indeks Gini di Beberapa Provinsi di Indonesia pada Tahun 2007-2017

Grafik 1.2 memperlihatkan laju dari Indeks Gini di beberapa provinsi di Indonesia, yang diambil berdasarkan provinsi dengan tingkat indeks gini yang paling tinggi, provinsi dengan tingkat indeks gini yang sedang dan provinsi dengan tingkat indeks gini yang paling rendah. Dapat kita lihat sesuai dengan grafik 1.2 diatas bahwa ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi di Provinsi DIY Yogyakarta. Grafik diatas secara langsung menjelaskan, jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan di tiap provinsinya,

tetapi hanya sebagian orang saja yang menikmatinya, terutama oleh orang-orang yang mempunyai kuasa dan termasuk golongan berpendapatan tinggi.

Salah satu ukuran peningkatan pencapaian proses pembangunan, stabilitas atau membaiknya ketimpangan pendapatan dalam sebuah negara adalah dengan memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang stabil dipengaruhi oleh stabilitas politik dari negara tersebut. Syarat pembangunan juga salah satunya adalah keseimbangan atau stabilitas dari lembaga yang ada, pengukurannya adalah dengan melihat kualitas dari institusi yang terdapat dari negara tersebut. Lembaga yang dimaksudkan sendiri adalah pemerintah di dalamnya (Meier & Baldwin, 1957).

Konsep politik sendiri adalah berbagai macam kegiatan dari pihak yang berwenang yang mempengaruhi kebijaksanaan yang dapat diterima dalam suatu masyarakat dan dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut (Easton, David dalam Budiardjo, Miriam 2003). Keynesian juga berpendapat bahwa intervensi dari negara diperlukan untuk menghubungkan peran negara dalam perekonomian. Hal itu dapat dilakukan dengan diadakannya kebijakan pemerintah yang menjamin adanya stabilitas, salah satunya dalam proses produksi dan penyerapan tenaga kerja yang memadai guna melancarkan perekonomian. Maka karena konsep-konsep tersebutlah dapat dipastikan bahwa sistem pemerintahan dalam sebuah negara dapat mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam segala

aspek kehidupan. Setiap kebijakan politik akan memiliki dampak positif dan negatif di segala aspek yang bersangkutan, terutama terhadap masyarakat negara itu sendiri.

Salah satunya adalah dalam aspek perekonomian di masyarakat seperti yang kita ketahui dalam Teori Keynesian yang sudah disebutkan. Hal ini dikarenakan sejak dahulu ilmu politik dan ekonomi saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Bahkan sejak masa Adam Smith sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa kinerja dalam aktifitas perekonomian bergantung pada faktor politik dan institusional (de Haan & Siermann Clemens, 1996). Hal tersebut juga dapat dijelaskan pada Teori *New Institutional Economy*, dimana teori ini membahas mengenai hubungan antara institusi atau lembaga dan bagaimana institusi atau Lembaga yang ada berinteraksi dengan pengaturan organisasi dan perekonomian (Menard, 2005). Namun dalam memaksimalkan perannya, dibutuhkan lembaga-lembaga pemerintahan sehat yang dapat mengatur perekonomian dan masyarakat di dalam sebuah negara tersebut.

Jika lembaga-lembaga tersebut tidak stabil dan tidak memaksimalkan tugasnya dengan baik, seperti yang dinyatakan oleh Alesina, Ozler, Roubini dan Swagel (dalam Görmüş & Kabasakal, 2010) bahwa keruntuhan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi dikarenakan ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah dan adanya hambatan kepada investor dalam berinvestasi yang dapat terjadi dikarenakan ketidakstabilan politik.

Ketidakstabilan politik salah satunya dapat terjadi dikarenakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah atau penyalahgunaan jabatan publik.

Pelanggaran atau penyalahgunaan yang paling sering terjadi dan kemudian menjadi fenomena umum di banyak negara adalah korupsi. Korupsi memang selalu menjadi isu hangat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara mendunia, korupsi sudah disepakati sebagai tindak pidana yang menjadi musuh dan penyakit bagi seluruh bangsa di seluruh negara di dunia. Korupsi tidak mengenal negara maju maupun negara miskin, karena korupsi kini sudah tumbuh dan mengakar bahkan menjadi budaya hampir di seluruh negara di dunia terutama di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.

Menurut *Transparency International Forum*, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pembuat keputusan politik dengan memanfaatkan posisi mereka dalam memanipulasi aturan prosedur dan kebijakan untuk keuntungan pribadi seperti dalam mempertahankan kekuasaan atau kekayaan untuk pribadi. Dalam Habib & Zurawicki (2001) korupsi pada umumnya terkait dengan kegiatan kenegaraan, terutama dalam hal monopoli kekuasaan negara.

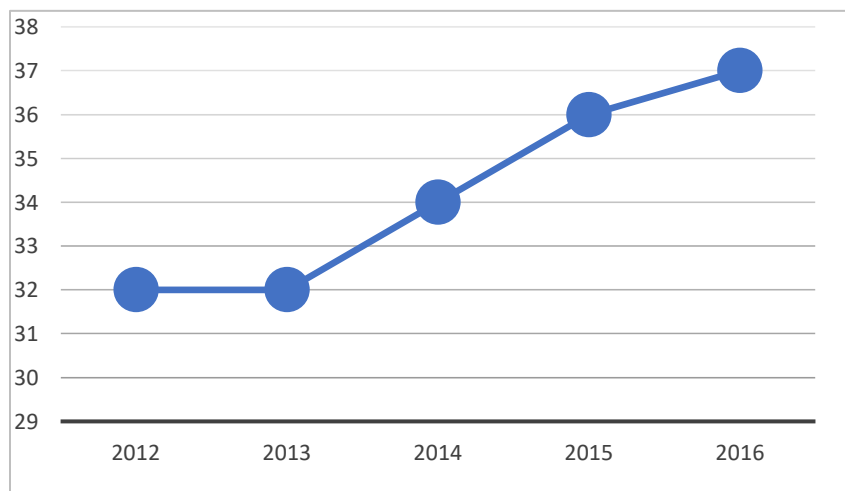
Namun Shleifer & Vishny (1993) menyatakan bahwa korupsi kini sebagai ajang penjualan properti pemerintah oleh pejabat pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Dalam kasus ini barang-barang yang dijual kepada agen-agen swasta adalah hal-hal yang digunakan untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi yang tidak dapat mereka dapatkan dengan mudah, seperti lisensi, izin, paspor, dan visa, yang sangat diperlukan, namun untuk mendapatkannya harus mematuhi hukum dan peraturan, yang kemudian memungkinkan dalam mendapatkannya justru dapat membatasi kegiatan

ekonomi agen-agen swasta tersebut. Pejabat-pejabat pemerintahan yang memiliki kebijaksanaan atas penyediaan barang-barang ini kemudian menjualnya dan nantinya mereka akan mendapatkan suap dari agen-agen swasta.

Korupsi menjadi menarik untuk dibahas lebih mendalam dikarenakan Tanzi (1998) di dalam jurnalnya membahas beberapa argumen yang menunjukkan bahwa masa sekarang korupsi lebih banyak diperhatikan daripada di masa lalu. Pertama, berakhirnya perang dingin pada saat itu menjadi alasan beberapa negara mengabaikan korupsi di negara-negara tertentu dan kemudian karena sudah merasa berada di kubu politik yang tepat, membuat terbentuknya sebuah kecenderungan untuk mengabaikan kasus-kasus korupsi yang cukup tinggi dan jelas di negara tertentu. Kedua, karena pada saat itu informasi masih kurang, selain itu adanya keengganan untuk membicarakan masalah-masalah pribadi dari negara lain dan adanya kecenderungan untuk tidak fokus pada korupsi, sehingga praktik korupsi diabaikan atau tidak dilaporkan secara luas pada saat itu. Ketiga, peningkatan pemerintahan yang demokratis di sejumlah negara serta mulainya era media yang bebas dan aktif yang kemudian membuat diskusi tentang korupsi tidak lagi tabu. Keempat, adanya globalisasi yang membuat individu dari negara-negara dengan praktik korupsi yang kecil berhubungan dengan orang-orang dari negara-negara di mana korupsi adalah permasalahan yang cukup menjadi perhatian. Terjalannya hubungan ini yang kemudian meningkatkan perhatian secara internasional terhadap korupsi. Kelima, ada dan meningkatnya peran dari organisasi non pemerintah, seperti *Transparency International Forum* yang mempublikasikan

masalah korupsi secara luas dan signifikan, juga IMF, *World Bank*, dan organisasi internasional lainnya yang kemudian mencoba menciptakan gerakan anti korupsi di banyak negara. Keenam, peningkatan terhadap daya saing menciptakan lingkungan yang lebih efisien menjadi penting untuk dilakukan, sehingga membuat korupsi menjadi menarik lebih banyak perhatian.

Untuk mengetahui seberapa parah tingkat korupsi di suatu negara, dikarenakan tidak ada cara langsung dalam mengukur korupsi, maka untuk mengukurnya, dapat menggunakan Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh *Transparency International Forum*. Parah atau tidaknya tingkat korupsi di suatu negara dapat dilihat ketika nilai indeks persepsi korupsi di suatu negara tersebut kurang dari 50 dengan skala 100. Berikut adalah grafik nilai Indeks persepsi korupsi di Indonesia:



Sumber: *Transparency International*

Grafik 1.3 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2012-2016

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh *Transparency International Forum* melalui indeks persepsi korupsi pada tahun 2017, Indonesia mendapatkan peringkat ke-96 dari 180 negara. Grafik 1.3 menjelaskan bahwa nilai indeks persepsi korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Maka dari itu, dapat dibuktikan bahwa di Indonesia sendiri, fenomena korupsi sudah menjadi perbincangan publik dan juga persoalan yang berkepanjangan.

Kasus-kasus korupsi di Indonesia juga banyak ditemukan, bahkan tidak hanya pada masa sekarang, tetapi juga sejak masa penjajahan. Susah untuk hilang pada tradisi korupsi di Indonesia inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia (*World Bank*, 2003). Salah satunya pada masa Orde baru (1967-1998), masa ini adalah masa dimana praktek korupsi di Indonesia mendapatkan dukungan serta kesempatan yang luas untuk berkembang. Legalitas terhadap tindakan mempertahankan kekuasaan dan kekayaan banyak terjadi pada masa tersebut.

Namun, setelah masa pemerintahan orde baru berakhir, ternyata masalah dalam memberantas korupsi belum juga tertangani dengan cukup baik di Indonesia, bahkan korupsi di masa reformasi justru lebih banyak terungkap. Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia pada masa sekarang yang paling banyak dibicarakan salah satunya adalah kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau KTP Elektronik (*e-KTP*). Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang diakibatkan oleh kasus ini kurang lebihnya adalah sebesar Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan dan

sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket *e-KTP* pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Kerugian Negara atas Kasus *e-KTP* ini juga tidak hanya dikarenakan besarnya anggaran yang dikorup atau tidak terlalu signifikannya fungsi dari kartu tersebut untuk kependudukan, tetapi juga efek yang ditimbulkan, yaitu ketidakakuratan pada data kependudukan. Anggaran yang tidak berbasis data yang jelas ini, yang kemudian menjadi sebab dari ketimpangan ekonomi. (<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/>, 18 Desember 2017).

Bertahannya kasus korupsi dari masa ke masa inilah yang kemudian membuat saya menjadi tertarik dalam membuat skripsi mengenai pengaruh dari korupsi terhadap aspek perekonomian, terutama dalam masalah ketimpangan pendapatan, yang juga kini menjadi masalah yang cukup diperhatikan di Indonesia. Dalam (Apergis, Dincer, & Payne, 2010) disebutkan bahwa beberapa peneliti berpendapat bahwa peningkatan korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Beban korupsi, jatuh secara tidak proporsional pada individu berpenghasilan rendah, yang membayar proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka daripada individu berpenghasilan tinggi. Lainnya berpendapat bahwa korupsi mendistorsi secara tidak langsung peran redistributif pemerintah, dengan cara mengalihkan sumber daya pemerintah dari program yang bermanfaat untuk individu berpenghasilan rendah.

Studi ini akan membahas kaitan antara faktor korupsi dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan rincian bahasan pada 33 provinsi di Indonesia mulai tahun 2011-2015.

1.2 Identifikasi Masalah

- Apakah pengaruh dari korupsi dan seberapa besar pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan di 33 provinsi di Indonesia pada periode 2011-2015?
- Apakah rata-rata lama sekolah, konsumsi pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 33 provinsi di Indonesia pada periode 2011-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pengaruh dari korupsi dan seberapa besar pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan di 33 provinsi di Indonesia pada periode 2011-2015.
- Untuk mengetahui rata-rata lama sekolah, konsumsi pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di 33 Provinsi di Indonesia pada periode 2011-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pengaruh korupsi terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga dapat memberikan informasi yang sebaik-baiknya. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi literatur bagi akademisi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Serta untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan sebagai referensi bagi pemerintah dan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi).